

PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS ANGGOTA

Harini¹

ABSTRACT

Basically co-operative member of empowerment is the responsibility of the Board of Directors, as in the degree of UU. No.25 Th 1992, pasal 23, ayat 2a, that education for the members in every co-op instution is responsibility of the board upon the mandate given by the highest authority General Assembly (Rapat Anggota /RAT).

Empowerment of co-operatives emerged as a result of human weakness on the one hand, while on the other hand, demands appreciation of the values and principles of co-operative experience laden ideal, invites potential problems objectively. The goal of empowerment of co-operatives to co-operative is able to realize what was to become his goal. Realize the ideals of the co-operative is loaded with the ideal values. Way is a cultivated man, building businesses, and community development organization forming a co-operative institutional identity in implentasinya. Changes in the quality of co-operative organizations (people, organizations, businesses,) as a result of empowerment is to realize the ideals of the co-operative as a pillar of the economy. Co-operative empowerment is a process to enable co-operative mengaktualisasikan his identity, so it can perform the role of co-operatives in accordance with his mission to lead to the achievement of its objectives. About the scope of activities related to the empowerment of co-operatives. Include aspects of organizational and business aspects, can be developed into five aspects: aspects of ideology, organization, capital, management and business.

While the participation of members of the co-operative is one form of participation in the co-operative members. Understanding of co-operative identity can be stated that the member has a central position, which is a source of strength to function as an initiator, controller, leader and also as a user of the continuity of life co-operatives. This means that the key to empowerment and the first major co-operative lies in the hands of members. From the viewpoint of strategic management into the 21st century vision of the co-operative is actualization of identity in the development through the empowerment of individual to achieve the figure of a healthy cooperative, tough and independent"

Key words : Empowering co-operative, co-operative identity, member of empowerment, individual of the members.,

¹ Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi-BKK Pendidikan Tata Niaga, Jurusan P. IPS FKIP Universitas Sebelas Maret

Pemberdayaan koperasi adalah proses untuk memungkinkan koperasi mengaktualisasikan jati dirinya, sehingga koperasi dapat menjalankan peran sesuai dengan misi yang diembannya guna mengarah pada pencapaian tujuannya.

Terkait tentang lingkup kegiatan pemberdayaan koperasi menurut meliputi aspek organisasi dan aspek usaha, dapat dikembangkan menjadi 5 aspek yaitu aspek ideologi, organisasi, permodalan, manajemen dan usaha.

Pemahaman Jati diri koperasi dapat dinyatakan bahwa anggota mempunyai posisi sentral, yaitu menjadi sumber kekuatan dengan berfungsi sebagai penggagas, pengendali, pemimpin dan sekaligus sebagai pengguna dari kelangsungan kehidupan koperasi. Ini berarti kunci upaya pemberdayaan koperasi utama dan pertama terletak di tangan anggota. Ditinjau dari sudut manajemen strategis memasuki abad ke 21 maka visi koperasi adalah "Aktualisasi jati diri dalam pengembangan melalui pemberdayaan berbasis anggota untuk mewujudkan sosok koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri".

PENDAHULUAN

Secara konstitusional, koperasi telah dinyatakan sebagai salah satu pemain pembangunan ekonomi nasional, sejajar dengan pemain lainnya, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Hal ini telah ditegaskan dalam sistem Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Perjuangan koperasi merupakan amanat yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD 1945), yaitu menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang intinya adalah potensi ekonomi untuk mensejahterakan rakyat.

Pada masa orde baru (periode 1966-1998) koperasi tidak luput dari perlakuan pemerintah yang menjurus menjadi koperasi sebagai alat pemerintah dan keberpihakan pemerintah kepada koperasi cenderung lebih banyak bersifat retorika (Soedjono, 1999:3). Koperasi justru mengalami pergeseran nilai dan hakikatnya. Sistem pemerintahan dan tatanan politik orde baru yang sentralistik, memanfaatkan

koperasi sebagai alat kepentingan politik untuk menancapkan kuku pengaruh kekuasaan sampai level masyarakat paling bawah. Koperasi didorong kuat oleh kebijakan politik, sehingga sangat struktural dan mengalir dari atas ke bawah.

Dengan penyelewengan-penyelewengan tersebut membuat koperasi Indonesia saat itu dilanda berbagai krisis mulai dari krisis ideologi, krisis identitas, krisis kepemimpinan, dan puncaknya pada krisis kepercayaan yang membawa koperasi Indonesia berada diambang kehancuran. Jelas keadaan ini tidak diharapkan oleh semua pihak, lebih-lebih di Indonesia pada era reformasi dalam menyongsong kehidupan ekonomi masa datang yang lebih adil dan demokratis. Sebenarnya sejak tahun 1999-an pemerintah mengamanatkan "Perlu ditempuh upaya pemberdayaan koperasi dalam rangka membangun sistem ekonomi nasional yang lebih berkeadilan dan demokratis".

Dengan latar belakang seperti di atas, maka pemberdayaan koperasi yang berbasis anggota khususnya, perlu ditangani secara profesional. Pada dasarnya, pemberdayaan koperasi melalui pembinaan anggota dengan berbagai upaya yang dilakukan seperti pendidikan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan dan sebagainya. Dengan pemberdayaan koperasi melalui program pembinaan anggota ini sesuai dengan ketentuan UU No 25 Th 1992, pasal 30, ayat 2a bahwa pembinaan terhadap anggota pada masing-masing koperasi menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus yang diberi mandat oleh rapat anggota (sebagai pemegang kekuasaan tertinggi) untuk menjalankan kepemimpinan koperasi.

Pendekatan pemberdayaan koperasi yang selama ini ditempuh pemerintah dengan *top down* tampaknya membuat banyak koperasi baik primer maupun sekunder tidak dapat diharapkan menciptakan kemandirian dan menimbulkan ketergantungan. Dalam kehidupan perekonomian pada era globalisasi yang sangat kompetitif, oleh karena itu dengan pendekatan pemberdayaan koperasi mulai dengan *bottom-up*. Oleh karena itu

berangkat dari asumsi tersebut, model pemberdayaan koperasi berbasis anggota disarankan untuk pemberdayaan koperasi masa yang akan datang.

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Menurut Ralph. F. Long (1996:6) pemberdayaan adalah pencipta iklim di mana semua personil yang ada di semua tingkatan organisasi tumbuh kehendak untuk sepenuhnya terlibat dan memiliki komitmen penuh guna mengarah pada pencapaian tujuan organisasi dengan melalui perbaikan kinerja baik organisasional maupun personal. Menurut Tjiptono (1997:108), pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Dengan kata lain, pemberdayaan berarti penciptaan kondisi untuk memampukan sesuatu subjek bekerja dengan kreatif untuk meraih prestasi yang lebih baik. Di dalam pemberdayaan ada suatu proses kegiatan untuk mengaktualisasikan potensi, sehingga membuat dirinya semula tidak berdaya menjadi berdaya dalam menjalankan perannya. Jadi dalam pemberdayaan ada harapan diperolehnya hasil berupa dari keadaan yang tidak berdaya menjadi berdaya yang didapat dari proses kegiatan mengaktualisasikan potensi. Dengan demikian pengertian pemberdayaan koperasi adalah proses untuk memampukan koperasi mengaktualisasikan jati dirinya, sehingga koperasi dapat menjalankan peran sesuai dengan misi yang diembannya guna mengarah pada pencapaian tujuannya.

Menurut Ninik Widiyanti (2004:19) menyatakan bahwa hakekat pemberdayaan koperasi harus ditinjau dari empat matra yang dalam geraknya berlangsung secara serempak dan mempunyai kekuatan saling mempengaruhi satu sama lain. Empat matra yang dimaksud adalah a). Koperasi sebagai proses karena rentetan perubahan kearah pertumbuhan dan perkembangan dari rendah ke status yang lebih tinggi,

b). Koperasi sebagai metode sebab pembangunan koperasi menempuh cara-cara yang terencana di atas disiplin keteraturan dan kesinambungan, sesuai dengan asas swakerta, swasembada dan swasembada, atau suatu pendekatan agar anggota berani mengungkapkan pendapatnya, c). Koperasi sebagai suatu program, sebab pembangunan koperasi merupakan paduan dari berbagai kegiatan dalam bidang kehidupan yang menyentuh kepentingan masyarakat kecil baik dari daerah perkotaan maupun pedesaan, atau sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera, d). Koperasi sebagai gerakan, sebab pertumbuhan dan perkembangan koperasi sesungguhnya suatu gerakan dari cita-cita kemasyarakatan yang ingin diwujudkan bersama sesuai dengan azas kekeluargaan dan gotong royong.

Dari pengertian pemberdayaan koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pokok pemberdayaan koperasi sebagai berikut: 1) Pemberdayaan koperasi merupakan proses kegiatan yang dirancang dan berlangsung secara berkesinambungan. Ini berarti pemberdayaan merupakan proses kegiatan yang secara sengaja dirancang untuk digulirkan bukan untuk waktu sesaat melainkan berlangsung terus menerus secara berkesinambungan; 2) Pemberdayaan koperasi yang merupakan proses kegiatan yang dirancang berlangsung secara berkesinambungan sasarannya adalah untuk memampukan koperasi mengaktualisasikan jati dirinya dalam arti dapat melaksanakan prinsip-prinsip sebagai penerapan dari nilai-nilai yang dimilikinya. Pemberdayaan koperasi dilaksanakan melewati proses penegakan jati diri dalam kelangsungan praktek hidup berkoperasi; dan 3) Tujuan pemberdayaan koperasi adalah agar koperasi mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Mewujudkan cita-cita koperasi yang sarat dengan nilai-nilai ideal (idealisme) bukan hal yang mudah, namun bukan tidak mungkin dapat dicapai.

Cita-cita koperasi yang luhur dan mulia dapat dicapai asal ada upaya yang sungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan. Pemberdayaan koperasi juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai koperasi hanya dapat mengobral janji-janji untuk muluk, sementara dalam praktek berkoperasi banyak janji-janji yang dipungkiri. Kalau ini terjadi pastilah citra koperasi di mata masyarakat akan jatuh.

HAKEKAT PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS ANGGOTA

Dengan latar belakang seperti di atas, maka konsep pemberdayaan koperasi pada dasarnya secara universal muncul karena berangkat dari asumsi adanya kelemahan manusia di satu pihak, sedang di lain pihak tuntutan penghayatan nilai-nilai dan pengamalan prinsip-prinsip koperasi yang sarat dengan muatan ideal (idealisme), secara obyektif potensial mengundang permasalahan. Dalam arti ada kerawanan akan terjadinya kecenderungan penyelewengan atas jatidiri koperasi karena kelemahan manusia untuk melaksanakan prinsip-prinsip koperasi. Sedang di Indonesia konsep pemberdayaan koperasi di samping berangkat dari asumsi kelemahan manusia, juga tidak lepas dari amanat UUD 1945 pasal 33, khususnya ayat 1 di satu pihak dan di lain pihak dari pengalaman sejarah koperasi yang diwarnai oleh berbagai penyelewengan yang membuat koperasi tidak mampu berperan sesuai amanat konstitusi. Lebih-lebih era reformasi pasca orde baru, koperasi dituntut untuk secara nyata dapat lebih berperan dalam upaya membangun tata susunan ekonomi nasional yang lebih kokoh, lebih adil dan lebih demokratis.

Dari artinya inisiatif mendirikan koperasi berasal dari kalangan anggota sebagai pemilik. Oleh, artinya jalannya kelangsungan kehidupan koperasi dikontrol oleh anggota sebagai pengendali. Untuk, artinya usaha koperasi diperuntukkan bagi anggota sebagai pengguna. Tiga fungsi anggota sebagai pemilik, pengendali, dan pengguna adalah merupakan jatidiri

koperasi, dan yang membedakannya dengan badan usaha yang lain (Soedjono, 1999: 32). Seperti yang dikemukakan Gray & Butler, pada dasarnya koperasi menegakkan tiga prinsip utama terkait dengan peran penting anggota: (1) sebagai pengguna-pemilik, (2) sebagai pengguna-pengendali, dan (3) sebagai pengguna-penikmat (Gray & Butler, 1991: 83). Dengan demikian jelaslah bahwa visi koperasi akan bertumpu pada kekuatan anggota dan pengawasan oleh anggota, yang menjadi acuan masa depan koperasi (Munkner, 1997: 6).

Dari hakikat tersebut, koperasi dibentuk pada dasarnya karena kesadaran individu, bahwa melalui kerja sama antar sesama anggota dalam wadah koperasi membuahkan penggalangan potensi sekaligus efisiensi dan efektivitas dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi bersama (Hatta, 1987:9). Menurut ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 koperasi bercirikan antara lain: (1) dari segi wujud, adalah organisasi yang menghimpun kerja sama antar orang bukan kumpulan modal, (2) dari segi fungsi, adalah sebagai organisasi ekonomi (bukan organisasi sosial), (3) dari segi nilai, sebagai organisasi yang menghimpun orang koperasi berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kebebasan, demokrasi, persamaan, keadilan, solidaritas dan tanggung jawab sosial, (4) dari segi watak sosial artinya mengutamakan pemberian layanan guna perolehan manfaat bagi anggota (service motives) daripada mencari keuntungan (profit motives), (5) dari segi tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Hakikat serta konsep tersebut di atas, dapat dipahami bahwa di dalam kehidupan koperasi anggota menjadi kekuatan utama, karenanya anggota menduduki posisi sentral. Sejauh mana posisi sentral anggota telah efektif dalam kehidupan koperasi sangat ditentukan oleh sejauh mana penerapan tiga fungsi anggota tersebut dapat diwujudkan sebagai satu kesatuan yang saling terkait secara fungsional maupun operasional. Ini berarti bahwa perolehan manfaat menjadi anggota

koperasi (anggota sebagai pengguna) bukanlah merupakan hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan buah yang didapat karena adanya partisipasi dari anggota sebagai pengendali, karena pada anggota tertanam rasa ikut memiliki terhadap koperasi (anggota sebagai pemilik). Dengan demikian pencapaian tujuan koperasi, dalam arti keberhasilan anggota sebagai pengguna, sangat tergantung pada kadar kualitas anggota sebagai pengguna, sangat tergantung kualitas individu, baik yang menyangkut anggota sebagai pemilik maupun anggota sebagai pengendali.

LINGKUP KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Terkait tentang lingkup kegiatan pemberdayaan koperasi menurut Nirbito (2001:43) meliputi aspek organisasi dan aspek usaha, dapat dikembangkan menjadi 5 aspek yaitu aspek ideologi, organisasi, permodalan, manajemen dan usaha. Sebagai sosok ideal koperasi yang disebut sebagai koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri (UU No. 25 Tahun 1992 pasal 61 ayat b. Pemahaman tentang sosok ideal koperasi yang akan menumbuhkan komitmen bagi insan-insan sebagai pelaku mengupayakan untuk mewujudkannya. Masing-masing pelaku dalam hal ini anggota, pengurus pengawas dan para pelaksana merasa bertanggungjawab (tumbuh komitmen) untuk menjalankan peran dan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan.

Aspek ideologi merupakan aspek inti, ini artinya pertama dan utamanya koperasi menyangkut soal pemahaman dan penghayatan para insannya terhadap jatidiri koperasi yang merupakan pancaran dari ideologi koperasi (Munkner, 1997; Soedjono, 2001: 3). Aspek inti inilah yang menjadi sumber kekuatan koperasi dan menggerakkan ke 4 aspek lainnya.

Aspek organisasi, ini berarti setelah ideologi dipahami dan dihayati oleh para insannya, maka organisasi tersebut merupakan wadah untuk mengamalkan ideologi koperasi. Ideologi yang telah di

pahami dan dihayati tidak punya makna apa-apa kalau tidak diamalkan. Organisasi merupakan wadah untuk mengamalkan ideologi koperasi tersebut.

Aspek permodalan, ini berarti koperasi sebagai badan usaha yang menghimpun orang tentu saja untuk menggerakkan usaha, koperasi membutuhkan modal tetapi bekerja bukan untuk modal (Soedjono, 2001: 8). Karenanya pemupukan modal perlu dilakukan, dan proses pemupukan modal koperasi didasarkan mekanisme organisasi (AD dan ART) yang ada pada aspek organisasi dan dijiwai oleh ideologi koperasi.

Aspek manajemen, ini berarti agar modal yang telah dipupuk berdasarkan mekanisme organisasi dan dijiwai oleh ideologi koperasi, dapat digunakan secara efektif dan dijiwai untuk pengembangan usaha, maka perlu menghadirkan manajemen yaitu cara pengelolaan koperasi yang profesional (menyerap ilmu dan teknologi). Penyerapan ilmu dan teknologi dalam pengelolaan koperasi ini harus berwawasan ideologi (*value-based professional cooperative management*) yaitu manajemen koperasi profesional yang berdasarkan nilai-nilai dan etika profesional (Soedjono, 2001: 7).

Aspek usaha, bahwa aspek ideologi, organisasi, permodalan dan manajemen adalah untuk menghimpun kekuatan guna mendorong berlangsungnya dan berkembangnya usaha demi peningkatan pelayanan usaha koperasi ini yang akan memungkinkan koperasi dapat memenuhi janji-janjinya, merealisasikan apa yang menjadi cita-citanya, melaksanakan misinya dan sekaligus mendekatkan pada pencapaian apa yang menjadi tujuannya.

UNSUR-UNSUR PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pada dasarnya pemberdayaan koperasi dalam pembinaan anggota menjadi tanggung jawab pengurus, hal ini sesuai dengan ketentuan UU No.25 Tahun 1992 pasal 35 ayat 2 a, pembinaan

terhadap anggota pada masing-masing koperasi menjadi tanggung jawab pengurus yang diberi mandat oleh rapat anggota (sebagai pemegang kekuasaan tertinggi) untuk menjalankan kepemimpinan koperasi. Sementara Nirbito (2001:18) mengatakan bahwa unsur-unsur pemberdayaan koperasi dapat dilihat dari pemahaman materi jati diri koperasi dan metode pemberdayaan koperasi menggunakan pendekatan *bottom-up*, dan ketersediaan permodalan dari para anggota.

Dengan Jatidiri koperasi dapat dinyatakan bahwa anggota mempunyai posisi sentral (dominan), yaitu menjadi sumber kekuatan dengan berfungsi sebagai penggagas, pengendali, pemimpin dan sekaligus sebagai pengguna dari kelangsungan kehidupan koperasi. Dari masing-masing fungsi tersebut maka anggota mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan jalannya kehidupan koperasi.

Bertolak dari alasan pentingnya pemberdayaan koperasi melalui pembinaan anggota, pengertian pembinaan adalah suatu upaya penyapaan lembaga kepada anggota melalui seperti penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan baik secara nonformal maupun informal berlangsung secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas anggota

Menurut Nirbito (2001:73) manfaat pemberdayaan koperasi dengan pembinaan anggota dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

1. Anggota

- a. Anggota menjadi lebih sadar akan rasa ikut memiliki koperasi.
- b. Anggota menjadi lebih menghayati nilai-nilai koperasi.
- c. Anggota menjadi lebih meningkat pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya dalam melaksanakan peran aktif sebagai anggota pada khususnya, dan pada umumnya peran aktif sebagai pelaku ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
- d. Penguasaan informasi oleh anggota menjadi meluas

sehingga akses anggota terhadap sumber-sumber ekonomi mencakup pasar, modal, pengadaan barang dan lain-lain menjadi meluas, dan pada gilirannya kesejahteraan anggota akan meningkat.

- e. Anggota menjadi lebih bermartabat, karena mereka mampu memecahkan masalah ekonomi mereka secara mandiri.

2. Organisasi

- a. Meningkatnya partisipasi anggota akan membuat koperasi mampu mengaktualisasikan jatidirinya, pada gilirannya akan membuat koperasi menjadi berdaya.
- b. Dengan berdayanya koperasi akan membuat koperasi mampu berperan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan aspirasi-aspirasi anggota.
- c. Berdayanya koperasi akan meningkatkan citra koperasi di tengah-tengah masyarakat, dan dengan demikian dapat melaksanakan amanat UUD 1945, pasal 33, khususnya ayat 1 dan penjelasannya.

3. Jejaring

1. Berdayanya koperasi akan dinikmati oleh jejaring berupa pelayanan usaha yang menguntungkan dan dapat dijadikan mitra usaha yang handal yang saling menguntungkan.
2. Berdayanya koperasi akan membuat kehidupan sosial ekonomi jejaring baik yang ada dalam koperasi maupun yang ada di luar (masyarakat luas) menjadi lebih baik, dan pada gilirannya dapat memberdayakan ekonomi rakyat.

PARTISIPASI ANGGOTA

Partisipasi anggota koperasi merupakan salah satu wujud peran dan tanggung jawab anggota dalam koperasi. Menurut Davis (1980:100) partisipasi anggota

Newstrom (1997:69) menyatakan bahwa "partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan ikut berbagai tanggung jawab atas tercapainya tujuan tersebut. Dari pengertian tersebut muncul tiga gagasan penting dalam partisipasi, yaitu keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab.

Partisipasi akan melibatkan mental dan emosional para anggotanya, bukan hanya melibatkan aktivitas fisik saja, melainkan melibatkan "diri orang itu sendiri". Keterlibatan di sini lebih bersifat psikologis, sehingga seseorang yang berpartisipasi dalam koperasi tidak sekadar terlibat dalam tugas-tugasnya, tetapi akan melibatkan egonya pula. Gagasan kedua yang muncul dalam pengertian partisipasi adalah adanya motivasi dari para anggota untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan koperasi.

Para anggota diberi kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreatifitasnya untuk mencapai tujuan koperasi. Gagasan lain yang penting adalah partisipasi akan mendorong para anggota koperasi untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas organisasi. Apabila para anggota berbicara tentang organisasi koperasinya, maka mereka akan berkata "kami", bukan "mereka". Partisipasi telah menjadikan para anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas tidak sekadar pelaksana seperti mesin, namun menjadi perangkat organisasi yang bertanggung jawab. Di samping itu, para anggota koperasi harus ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup koperasi. Dengan demikian, partisipasi merupakan sebuah proses sosial di mana para anggota koperasi terlibat langsung dalam organisasi dan ingin mewujudkan tujuan atau kepentingan bersama.

Partisipasi mencakup berbagai bentuk keikutsertaan anggota dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan anggota untuk mengembangkan organisasi koperasi. Salah satu cara memotivasi semua komponen atau unsur dalam koperasi agar mau dan bersedia melibatkan

dirinya dalam kegiatan koperasi (pendekatan psikologis). Partisipasi mengandung potensi luar biasa untuk membina dan mengembangkan kinerja seorang individu, kelompok dan bahkan organisasi. Apabila partisipasi dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh minimal dua hasil terbaik, yaitu perubahan dan keterikatan terhadap tujuan yang dilandasi kesadaran akan tanggung jawab yang diemban masing-masing anggota yang pada akhirnya akan mendorong timbulnya suatu hasil prestasi yang baik dalam pengembangan usaha koperasi.

Pengorbanan yang dituntut dari anggota yang merupakan konsekuensi dari idealisme yang telah tertanam dari anggota adalah berupa tindakan nyata yang memungkinkan motif bergabung dalam koperasi untuk menggalang potensi benar-benar terwujud. Tindakan nyata dari anggota merupakan pengorbanan yang dituntut dari anggota guna mencapai cita-cita koperasi. Jadi dalam koperasi ada semangat dan perbuatan, keduanya merupakan satu kesatuan yang terkait (Hatta, 1987: 97). Peran aktif anggota sebagai pengguna-pemilik, pengguna-pengendali, dan pengguna-penikmat dalam praktek merupakan wujud partisipasi anggota sebagai cerminan adanya pemberdayaan koperasi (Nirbito, 2001:61).

Pemahaman jatidiri koperasi dapat dinyatakan bahwa anggota mempunyai posisi sentral (dominan), yaitu menjadi sumber kekuatan dengan berfungsi sebagai penggagas, pengendali, pemimpin dan sekaligus sebagai pengguna dari kelangsungan kehidupan koperasi. Dari masing-masing fungsi tersebut maka anggota mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan jalannya kehidupan koperasi seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Fungsi dan Peran Anggota dalam Pemberdayaan Koperasi

No	Fungsi	Peran
1	Penggagas	<p>Pendiri:</p> <p>Koperasi didirikan/ dibentuk oleh anggota sebagai wadah untuk bekerjasama guna mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi bersama.</p> <p>Pemilik:</p> <p>Anggota tidak hanya mendirikan/ membentuk tetapi juga sebagai pemilik. Sebagai pemilik, anggota mempunyai tanggungjawab secara bersama-sama untuk memberikan kontribusi memenuhi kebutuhan permodalan.</p>
2	Pengendali	<p>Pengambil keputusan:</p> <p>Untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan strategis menyangkut kehidupan koperasi wewenang untuk memutuskan ada di tangan anggota lewat rapat anggota. Hal-hal yang bersifat mendasar dan strategis meliputi: AD, kebijakan umum, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, pengesahan RK, RAPB dan laporan pertanggungjawaban pengurus, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi (pasal 23, UU No 25 Tahun 1992)</p>

		<p>Pengawas:</p> <p>Keadaan kehidupan koperasi transparan bersikap terbuka bagi anggota, karenanya anggota mempunyai tanggungjawab untuk melunasi jalannya kehidupan koperasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan. Untuk menjamin kualitas dan kontinuitas pengawasan, rapat anggota mengangkat pengawas yang dipilih dari kalangan anggota.</p>
3	Pemimpin	<p>Pengurus:</p> <p>Dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota, diberi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi sesuai keputusan rapat anggota.</p>
4	Pengguna	<p>Pasar:</p> <p>Anggota bertindak sebagai konsumen dan layanan bisnis koperasi.</p> <p>Mitra:</p> <p>Anggota dapat bertindak sebagai mitra bisnis koperasi yang saling menguntungkan.</p>

Dari tabel tersebut tampak bahwa mulai koperasi didirikan, dikelola, dioperasionalkan sampai pengawasan anggota menduduki posisi sentral. Fungsinya dominan dan perannya sebagai pelaku utama menentukan maju mundurnya koperasi. Pemberdayaan koperasi menyangkut proses bagaimana agar peran sentral, fungsi dominan, dan peran sebagai pelaku utama dari anggota benar-benar dapat menjadi realitas dalam kehidupan koperasi sehari-hari.

Frank Groves (1985: 9) memaparkan matriks yang mirip, yaitu menunjukkan posisi sentral dari anggota namun berbeda dalam sudut tinjauan mencakup tujuan, proses pengambilan keputusan, pengangkatan pengurus, struktur, prosedur pembuatan kebijakan dan kontribusi kepada pemilik modal sendiri dan distribusi dari sisa hasil usaha. Matriks ala Groves yang menunjukkan pentingnya peran anggota dalam koperasi dapat disimak dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Keunikan Posisi Anggota dalam Manajemen Koperasi

No	Perihal	Posisi Anggota	Implikasi
1	Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan anggota	Optimalisasi pelayanan kepada anggota (<i>service motive</i> bukan <i>profit motive</i>)
2	Proses pengambilan keputusan	Demokratis, satu anggota satu suara	Anggota memerlukan pendidikan untuk pengambilan keputusan
3	Pengangkatan pengurus	Diangkat dari kalangan anggota	Pengurus memerlukan <i>training</i>
4	Struktur	Pemilik, pengguna dan pengendali adalah orang yang sama yaitu anggota	Anggota memerlukan pendidikan
5	Prosedur pembuatan kebijakan	<i>Quasi public</i>	Anggota memerlukan pendidikan

6	Kontribusi kepada pemilik modal sendiri dan distribusi SHU	Proporsional jasa anggota sebagai pengguna dan pemilik	Anggota memerlukan pendidikan untuk memahaminya tanggung jawabnya
---	--	--	---

Dari matriks ala Frank Groves (1985: 13) perihal penting menyangkut kehidupan koperasi yang mencakup enam butir, keseluruhannya tidak ada yang tidak melibatkan anggota. Ini berarti kunci upaya pemberdayaan koperasi utama dan pertama terletak di tangan anggota. Ditinjau dari sudut manajemen strategis memasuki abad ke 21 maka visi koperasi adalah "Aktualisasi jatidiri dalam pengembangan melalui pemberdayaan anggota untuk mewujudkan sosok koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri".

PENUTUP

Perkembangan koperasi sampai saat ini masih menunjukkan adanya berbagai krisis mulai dari krisis ideologi, krisis identitas, krisis kepemimpinan, dan puncaknya pada krisis kepercayaan akibat perlakuan koperasi pada masa orde baru. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang intinya adalah potensi ekonomi untuk mensejahterakan rakyat pada kenyataannya mempunyai beberapa kelemahan yaitu manusia di satu pihak, sedang di lain pihak tuntutan penghayatan nilai-nilai dan pengalaman prinsip-prinsip koperasi yang sarat muatan ideal (Idealisme). Belum melembaganya nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi pada organisasi tersebut terlihat pada anggota koperasi maupun koperasi itu sendiri. Kurangnya peran serta anggota sebagai akibat kurangnya pemahaman jatidiri koperasi (nilai-nilai dan prinsip-prinsip) harus segera dibenahi dengan pemberdayaan koperasi melalui program pembinaan anggota melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan. Dengan perubahan kualitas anggota, kualitas organisasi dan kualitas

usaha diharapkan mampu menjadi pelaku

ekonomi yang kompetitif dan prospektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, P. 1997. *Co-operative Identity and Management International Co-Operative information Centre*.
- Fandy Tjiptono. 1997. *Prinsip-prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Frank Groves. 1985. *What is Cooperation? The Philosophy of Cooperation and it's Relationship to Cooperative Structure and Operations*. University of Wisconsin Center for Co-operative.
- Gray, T.W & Butler G, 1991. *Charting From Within a Grounded Concert of Member Control*. Journal of Agricultural Cooperation. V01 G,PP. 82-93.
- Hatta, A. 1987. *Koperasi sebagai Institut Pendidikan Oto-Aktivitas dan Budi Pekerti yang Murni dalam Nasution, M. dan Taufiq, M. 1992. Dokotomi dan Evolusi Nilai-Nilai Koperasi*. INFOKOP Nomor 11 Tahun IX, Mei 1992. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi.
- Ibnu Soedjono. 1999. *Jati Diri Koperasi*. Jakarta: LSP21.
- 2001. *Jati Dijri Koperasi dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta LSP21.
- Long Ralph. F. 1996. *Emporwerment Mangement Style for the Millenium Empowerment in Organization*. V 04. number 3, pp. 5-15.
- Munkner, Hans 1997. *Masa Depan Koperasi (terjemahan)*. Jakarta Dekopin.
- Nirbito. 2001. *Pembinaan Anggota untuk Memperdayakan Koperasi KOPPAS dan KOPWAN Jawa Timur*. Desertasi tidak diterbitkan Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Totok Mardikanto. 2010. *Metode Penelitian Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat. Untuk Akademik Praktisi, dan Peminat Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Program, Pascasarjana UNS-Solo.
- Wahyudi Kumorotomo.2008. *Perubahan Paradigma Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*.Background Study RPJMD Tahun 2010-2014 Bidang Pemberdayaan Koperasi UMMA Bapenas.
- Widiyanti, Ninik. 2004. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.